



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar instansi pemerintah mampu menjawab tuntutan lingkungan yang strategi baik lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyeleraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Pelaksanaan analisis internal dan eksternal, oleh para perencana strategi dapat mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi didalam memenuhi visi dan misinya. Pertanyaan “bagaimana kita menuju kesana” dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan target-target kinerja yang digambarkan dengan capaian suatu indikator kinerja



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016

Keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan dinilai melalui pengukuran pencapaian indikator kinerjanya.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Rencana Strategis Daerah (Renstrada) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, pelaksanaannya telah memasuki tahun *kelima atau tahun terakhir* dari lima tahun yang telah ditetapkan (2011-2016) dan dijadikan tolok ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Perencanaan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat *Dahani Dahanai Tuntung Tulus*, maju, mandiri, berkualitas dengan memiliki iptek dan imtaq.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan 2011-2016, merupakan manifestasi dari visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang ditransformasikan kedalam tujuan dan sasaran melalui pembangunan daerah yang berkesinambungan. Dengan menyusun RPJMD yang digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016

(Renstra SKPD) ini diharapkan penyelenggaraan pembangunan di Barito Selatan lebih terarah serta lebih menjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan yang diprioritaskan lima tahun mendatang. Bagi manajemen pemerintah Kabupaten Barito Selatan, dokumen rencana startegis ini dapat dipandang sebagai :

- Kerangka pikir dan pola tindak yang konsepsional untuk mengerahkan dan mengarahkan semua potensi daerah secara sinergis pada tujuan yang disepakati oleh semua komponen dalam jangka waktu tertentu secara terukur.
- Landasan formal dalam melaksanakan mandat bagi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk melakukan tindakan-tindakan strategis dan kongkrit sehingga terwujud otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Barito Selatan.

A. Pernyataan Visi Dan Misi

Visi adalah keadaan yang diharapkan terwujud dalam masa lima tahun, berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016

Dengan batasan tersebut, visi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

“Terwujudnya Kondisi Yang Mantap Dalam Tatanan Masyarakat Barito Selatan Menuju Dahani Dahanaï Tuntung Tulus”

Dari pernyataan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berkeinginan untuk menjadi pendorong utama dalam mewujudkan masyarakat yang *dahani dahanaï tuntung tulus*, maju, mandiri, berkualitas dengan memiliki iptek dan imtaq (taqwa).

Kondisi ideal yang terkandung didalam rumusan visi ini menempatkan faktor stabilitas keamanan dan kesejahteraan menjadi perhatian pokok yang ingin diwujudkan bagi masyarakat secara menyeluruh baik sebagai pelaku maupun sasaran dengan *capacity building* yang tercermin dalam pola sikap perilaku, potensi, disiplin, etos kerja tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dengan bermuatan iman dan imtaq, untuk mengelola sumber daya alam secara optimal dalam segenap aspek pembangunan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan, dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.

Visi Kabupaten Barito Selatan tersebut diwujudkan dalam keinginan tekad dan komitmen bersama yang dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) misi yaitu:



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016**

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur untuk membuka isolasi daerah melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dermaga dan pelabuhan udara, sehingga memiliki keterkaitan antara daerah satu dengan yang lainnya.
2. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata serta terakses
3. Menjamin kesehatan masyarakat yang merata dan terakses
4. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan pertanian dalam arti luas dengan berorientasi pasar yang didukung dengan kelembagaan, teknologi dan kemudahan permodalan serta informasi yang didukung oleh prasarana penunjang
5. Mengembangkan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah, penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada publik yang lebih baik untuk mewujudkan Good Governance
6. Menciptakan kondisi masyarakat yang aman, dalam kehidupan yang dinamis didalam keberagaman agama, suku, ras dan golongan dengan memberikan pembinaan kehidupan berpolitik dan penegakan supremasi hukum yang berkeadilan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
7. Meningkatkan pemberdayaan dalam pengelolaan hutan dan pemanfaatan potensi pertambangan untuk menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan daerah



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016

Penjelasan atas masing-masing misi dan keterkaitannya dalam mendukung pembangunan daerah Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut :

1. *Membangun dan meningkatkan infrastruktur untuk membuka isolasi daerah melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dermaga dan pelabuhan udara sehingga memiliki keterkaitan antara daerah satu dengan yang lain.*

Permasalahan dalam infrastruktur pembangunan Kabupaten Barito Selatan yang paling utama adalah menyangkut ketersediaan infrastruktur dasar bagi berjalannya roda pembangunan daerah meliputi permasalahan aksesibilitas daerah, irigasi teknis dan kelistrikan. Permasalahan-permasalahan tersebut mencakup :

1. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur terutama prasarana jalan dan jembatan serta prasarana lalu lintas air antar kecamatan dan desa;
2. Karakteristik geomorfologi pembentukan wilayah Kabupaten Barito Selatan yang terdiri dari daerah rawa dan daerah aliran sungai menyebabkan Kabupaten Barito Selatan membutuhkan transportasi antar kota yang memadukan antara transportasi darat dan sungai;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016

3. Masih terbatasnya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan.

2. *Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata serta terakses.*

Dibidang sumber daya manusia permasalahan dan tantangan yang dihadapi antara lain belum meratanya jenjang pendidikan di daerah karena kondisi wilayah yang terpencil, Disamping itu juga kualitas pendidikan masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan peserta didik yang disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, terbatasnya jumlah guru dan belum memadainya fasilitas belajar terutama buku pelajaran, peralatan peraga pendidikan karena terbatasnya dana yang tersedia.

Pendidikan merupakan ujung tombak sebuah kemajuan daerah, tingkat kesejahteraan daerah salah satunya dapat diukur melalui seberapa besar tingkat kemajuan yang diraihinya.

Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata serta terakses merupakan upaya bersama untuk mendukung program Kalteng harati. Program ini merupakan tiang utama pendukung Program Kalteng Harati yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016

3. *Menjamin Kesehatan Dasar Masyarakat yang Merata dan Terakses.*

Indikator kondisi kesehatan di Kabupaten Barito Selatan masih menghadapi tantangan, jumlah dokter dan dokter spesialis khususnya di Kabupaten Barito Selatan belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan.

4. *Mengembangkan Perekonomian Masyarakat melalui Pengelolaan Pertanian dalam arti luas dengan berorientasi pasar yang didukung dengan kelembagaan, teknologi dan kemudahan permodalan serta informasi yang didukung oleh prasarana penunjang.*

Upaya untuk mengembangkan ekonomi masyarakat terus diupayakan dalam periode pembangunan selama ini, Program pemerintah melalui Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Daerah Aliran Sungai Barito (KAPET DAS BARITO) yang berada didalam dan membelah wilayah Kabupaten Barito Selatan sebagai salah satu potensi untuk pengembangan ekonomi masyarakat, namun pada beberapa kawasan tertentu telah mengalami penurunan fisik lingkungan sehingga terjadi longsor dan banjir sehingga harapan terjadinya peningkatan manfaat ekonomi masyarakat masih harus diupayakan.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016

Secara umum tingkat kesejahteraan rakyat masih rendah, yang tercermin dari tingkat pendapatan yang masih rendah yang berakibat sulitnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Hal ini diakibatkan oleh daya dorong perekonomian, penyediaan infrastruktur terbatas, sempitnya lapangan pekerjaan dan penurunan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

5. *Mengembangkan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah, penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada publik yang lebih baik untuk mewujudkan Good Governance*

Salah satu untuk perlunya penguatan SDM yang mesti dilakukan secara terencana dan terus menerus dilingkungan pemerintahan, termasuk pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, sosial dan lain-lain). Transformasi mentalitas birokrasi akan terus dilanjutkan dalam rangka memantapkan sistem *good governance* yang sudah mulai terintis dalam beberapa tahun belakangan, selain upaya penguatan kapasitas inovasi birokrasi melalui berbagai program beasiswa pendidikan dan pelatihan. Khususnya untuk aparatur pelayanan langsung misalnya guru, petugas kesehatan dan penyuluhan lapangan pengembangan dan penguatan kapasitas akan terus dilakukan.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016

6. *Menciptakan kondisi masyarakat yang aman, dalam kehidupan yang dinamis didalam keberagaman agama, suku, ras dan golongan dengan memberikan pembinaan kehidupan berpolitik dan penegakan supremasi hukum yang berkeadilan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.*

Dalam rangka upaya meningkatkan pembangunan dan terbukanya isolasi serta dampaknya, maka diperlukan adanya suatu program yang komprehensif dan holistik guna terciptanya kerukunan dan keharmonisan serta kesejahteraan rakyat di Barito Selatan dengan semangat HUMA BETANG dan BHINNEKA TUNGGAL IKA. Implementasi program ini disamping melalui forum yang sudah ada, juga harus berkesinambungan dimasyarakatkan nilai-nilai positif kemajemukan melalui tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh lainnya seperti para Damang. Sehingga terciptanya kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah serta kerukunan dan kedamaian antar suku, ras dan golongan masyarakat Barito Selatan.

7. *Meningkatkan pemberdayaan dalam pengelolaan hutan dan pemanfaatan potensi pertambangan untuk menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan daerah.*



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016**

Kondisi wilayah Barito Selatan diindikasikan dengan perlunya rehabilitasi kerusakan akibat banjir dan longsor, perlindungan daerah tangkapan air, hutan lindung dan hutan monumental, perbaikan kondisi sumber daya alam yang sudah terganggu/rusak, konservasi dan rehabilitasi lahan melalui penghijauan dan reboisasi, pencegahan dan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, penertiban perizinan dibidang kehutanan, perambahan hutan, illegal logging dan industri pengolahan kayu, pengembangan dan pemanfaatan hutan untuk kesejahteraan masyarakat, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan hutan tanaman hutan lestari, penertiban perizinan pertambangan dan pengembangan pemanfaatan potensi tambang dengan bekerja sama dengan investor.

Demikian penjabaran Misi sebagai kelanjutan dari Penjabaran Visi yang ingin dicapai selama Program Jangka Menengah Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan 2011-2016 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 – 2016.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Keberhasilan atau pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah dengan dukungan dari sasaran dan program yang dapat diwujudkan dan diukur untuk mencapai keberhasilan tersebut. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan penjabaran dari RPJMD Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :

| No. | Misi | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2015 |
|-----|---|--|--|--|
| 1. | Membangunan dan meningkatkan infrastruktur untuk membuka isolasi daerah melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dermaga dan pelabuhan udara, sehingga memiliki keterkaitan antara daerah satu dengan yang lainnya. | Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan prasarana umum untuk membuka keterisolasian daerah | <ul style="list-style-type: none">- Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik- Panjang Jalan Antar Kawasan Tumbuh- Terehabilitasi Terminal Angkutan Darat- Terehabilitasinya Terminal Angkutan Air- Meningkatnya Fasilitas Bandara- Luas dan Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik (ha) | 421,66 6 1 |
| 2. | Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata serta terakses | Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan | <ul style="list-style-type: none">- Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI- Rasio Ketersediaan Sekolah SD/MI- Persentase Guru SD/MI Berkualifikasi S1/D4 dan Bersertifikasi- Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs- Rasio Ketersediaan SMP/MTs- Persentase Guru | 101:18 1:83 82 170,69 76 87 |



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016

| No. | Misi | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2015 |
|-----|--|--|---|---|
| | | | SMP/ MTs Berkualifikasi S1/D4 dan Bersertifikasi | |
| 3. | Menjamin kesehatan masyarakat yang merata dan terakses | Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan tenaga kesehatan | <ul style="list-style-type: none"> - Rasio Posyandu per satuan Balita - Rasio Puskesmas Per Penduduk - Rasio Dokter Per satuan penduduk - Rasio Dokter per satuan penduduk | 1:75 10:100.000 390:100.000 |
| 4. | Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan pertanian dalam arti luas dengan berorientasi pasar yang didukung dengan kelembagaan, teknologi dan kemudahan permodalan serta informasi yang didukung oleh prasarana penunjang | Terwujudnya sistem perekonomian kerakyatan terpadu | <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Koperasi Aktif - Usaha Mikro dan Kecil (unit) - Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (unit) | 88,33 925 52 |
| 5. | Menciptakan kondisi masyarakat yang aman, dalam kehidupan yang dinamis didalam keberagaman agama, suku, ras dan golongan dengan memberikan pembinaan kehidupan berpolitik dan penegakan supremasi hukum yang berkeadilan serta perlindungan terhadap HAM | Terwujudnya kondisi masyarakat yang aman dalam kehidupan yang dinamis didalam keberagaman agama, suku, ras dan golongan | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP - Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah - | 109 Ormas/LSM 1 Kegiatan |
| 6. | Mengembangkan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah, penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada publik yang lebih baik untuk mewujudkan Good Governance | Terwujudnya kelembagaan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada publik yang lebih baik untuk mewujudkan good governance | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Perda/ Perbup/ Keputusan Laporan Penataan Kelembagaan - Persentase SKPD yang meningkatkan Pelayanan Publik - Persentase Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi | 30 Dokumen 90% 65% |



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016

| No. | Misi | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2015 |
|-----|--|--|---|--------------|
| 7. | Meningkatkan pemberdayaan dalam pengelolaan hutan dan pemanfaatan potensi pertambangan untuk menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan daerah | Terwujudnya pengelolaan hutan dan potensi pertambangan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah | - Jumlah Penataan Kawasan Hutan - Pendataan Sumberdaya Hutan - Persentase Tenaga Kerja yang Terserap Disektor Pertambangan - Jumlah PAD dari Sektor Pertambangan | 6 4 55 |

C. Penetapan Kinerja

Salah satu upaya untuk mewujudkan adanya pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel adalah melalui penguatan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah.

Dalam hal ini upaya penguatan akuntabilitas kinerja salah satu caranya dapat dilakukan dengan penyusunan dokumen penetapan kinerja atau biasa disebut dengan dokumen perjanjian kinerja atau kontrak kinerja.

Mekanisme penyusunan dan penggunaan kontrak kinerja / penetapan kinerja ini berpedoman pada **Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah** yang diharapkan akan dapat menguatkan komitmen para pemimpin instansi dan unit kerjanya dalam pencapaian target-target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya.



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016**

Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 merupakan lanjutan perencanaan kinerja yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul kewenangan lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Rencana kinerja ini pula merupakan alat yang bermanfaat untuk mengecek apakah instansi dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Selain itu dengan rencana kinerja akan lebih mudah mengukur tingkat capaian kinerja pada akhir tahun 2016, karena dapat segera dilakukan perbandingan antara rencana dan realisasi.

Selanjutnya dalam penyusunan kebijakan pembangunan Kabupaten Barito Selatan tahun 2016 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA), APBD Tahun 2016, Strategi dan Prioritas APBD Tahun 2016. Untuk itu dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan kebijakan pembangunan yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016

Berdasarkan kebijakan pembangunan tersebut diatas, kemudian menjadi dasar pengembangan program utama yang dilaksanakan pada tahun 2016. Sebagai tindak lanjut dari **Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**. Maka Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2016 sebagai berikut :

Penetapan Kinerja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2016 |
|-----|--|--|--|
| 1. | Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan prasarana umum untuk membuka keterisolasian daerah | <ul style="list-style-type: none">- Panjang Jalan dlm Kondisi Baik- Jumlah Rehab Jembatan- Terehabilitasi Terminal Angkutan Darat dan Air- Meningkatnya Fasilitas Bandara- Rasio Jaringan Irigasi- Luas dan Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik | <ul style="list-style-type: none">1,239,76 km6 Terminal / Dermaga1 Bandara5.000 ha |
| 2. | Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata serta terakses | <ul style="list-style-type: none">- Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI- Rasio Ketersediaan Sekolah SD/MI- Persentase Guru SD/MI Berkualifikasi S1/D4 dan Bersertifikasi- Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs- Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/MTs- Persentase Guru SMP/ MTs Berkualifikasi S1/D4 dan Bersertifikasi | <ul style="list-style-type: none">101,14 APS1:8368 %94,751:3299,40% |



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2016 |
|-----|---|---|---|
| 3. | Menjamin kesehatan dasar masyarakat yang merata dan terakses | - Rasio Posyandu per satuan Balita - Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Penduduk - Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk - Rasio Dokter per satuan penduduk | 1:80 10:100.000 390:100.000 36:100.000 |
| 4. | Terwujudnya sistem perekonomian kerakyatan terpadu | - Persentase Koperasi Aktif - Usaha Mikro dan Kecil - Jumlah Investor Berskala Nasional | 87,33 915 unit 51 Investor |
| 5. | Terwujudnya kondisi masyarakat yang aman dalam kehidupan yang dinamis didalam keberagaman agama, suku, ras dan golongan | - Jumlah Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP - Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah | 109 Ormas 1 Kegiatan |

D. Program Prioritas Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 – 2016, telah ditetapkan Program Prioritas Daerah yang terdiri dari 7 (tujuh) program pokok yang disebut dengan “**SAPTA PROGRAM**” yaitu sebagai berikut :

| No. | Sapta Program Daerah | Anggaran (Rp.) |
|-----|--|---------------------------|
| 1. | Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah | 198.311.699.510,00 |
| 2. | Peningkatan Pembangunan Bidang Pendidikan | 312.068.507.980,00 |
| 3. | Peningkatan Pembangunan Bidang Kesehatan | 118.272.796.328,00 |
| 4. | Peningkatan Pembangunan Ekonomi Rakyat | 73.387.876.990,00 |
| 5. | Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama serta Sinergitas dan Harmonisasi Kehidupan Bermasyarakat | 6.099.948.840,00 |
| 6. | Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan (Reformasi Birokrasi) | 158.963.462.249,00 |
| 7. | Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) | 183.962.321.080,00 |
| | JUMLAH | 738.998.104.997,00 |



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016

E. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2016

Arah kebijakan pada tahun 2016 ini merupakan tahap akhir, namun masih tetap merupakan kelanjutan dan penuntasan bagi keseluruhan tahap pembangunan selama 5 (lima) tahun. Arah kebijakan ini harus dipandang sebagai kebijakan akhir dengan tetap melihat keberhasilan tahap-tahap sebelumnya. Arah kebijakan pembangunan tahun 2016 fokus pada tahap berikut ini :

1. Pengembangan infrastruktur dasar dan jaringan transportasi, komunikasi, pengairan, kelistrikan, taman kota dan implementasi pemanfaatan tata ruang
2. Pengembangan fasilitasi sarana dan prasarana kota Buntok menuju kota transit, perdagangan dan pariwisata ekonomi
3. Pengembangan sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan kependidikan
4. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
5. Pengembangan pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi
6. Penyediaan sarana dan prasarana dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016**

8. Pengembangan ekonomi kerakyatan
9. Peningkatan inovasi dan produktivitas ekonomi kerakyatan
10. Pengembangan pusat-pusat perekonomian unggulan daerah
11. Pengembangan kapasitas dan kinerja aparatur
12. Stabilitas kehidupan sosial politik masyarakat
13. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketrampilan masyarakat
14. Revitalisasi pengelolaan hutan
15. Pengembangan daya saing dan orientasi ekspor komoditas lokal
16. Pengembangan kehidupan masyarakat yang rukun, damai dan sejahtera.